

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU DAN JURNAL

- A, Suherman. (2019). Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan. *Sign Jurnal Hukum* , 42-51.
- Afif, M. (2018). PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP KASUS CAROK AKIBAT PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP KASUS CAROK AKIBAT. *SOUMATERA LAW REVIEW* , 311.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardiputra, S. (2022). Sosialisasi UU ITE No.19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI) Vol. 2, No. 2* , 707-718.
- Asnawi, N. (2020). *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press.
- Lestari, P. (2020). Ratio Decidendi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Mengenai Perjanjian Jual Beli Tanah yang Berkeadilan. *Journal of Islamic Business Law* , 7-8.
- Masukun dan Wiwik Meilararti. (2017). *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung: Keni Media.
- Minin, A. R. (2017). Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana intimidasi di internet (Cyberbullying) sebagai kejahatan mayantara (cybercrime). *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* , 1-18.
- Perkasa, R. E., Nyoman Serikat, P., & Turisno, B. E. (2016). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal* , 1-13.
- Piliang, Y. A. (2012). Masyarakat informasi dan digital: Teknologi informasi dan perubahan sosial. *Jurnal Sositologi* , 143-155.
- Setiawan, R. A. (2017). Analisis Komunikasi sosial media twitter sebagai saluran layanan pelanggan provider internet dan Seluler di Indonesia. *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence* , 16-25.
- Suseno, S. (2012). *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama.
- Widodo. (2013). *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Wijaya, E. (2010). Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/Pn.jkt.sel". *Jurnal Yudisial* , 117.

Wijayanto, D. E. (2017). Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dimedia Sosial diinjau Dari Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Telah Diperbarui Di Dalam Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Independent Vol 5 No. 2* , 38-39.